

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru

* **Widia Mutiara¹, Arif Rahman Hakim²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : widiamutiara60@student.uir.ac.id

Abstrak

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau sejak tahun 1958, Kota pekanbaru sampai saat ini masih sering dilanda banjir serta mengalami genangan yang cukup luas dan lama di setiap musim hujan. Banjir dapat berupa genangan air, pada lahan yang biasanya kering seperti pada lahan pertanian, permukiman, dan pusat kota. Banjir juga mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur dan properti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru serta juga untuk melihat faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam menjalankan perannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Peran dari Mudrajat Koncoro. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif. Lokasi pada penelitian ini terletak di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan 3 teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menjalankan perannya sesuai dengan indikator, coordinator, fasilitator dan stimulator, tetapi belum optimalnya pelaksanaan tersebut dikarenakan terdapat beberapa hambatan dan tantangan sehingga pelaksanaannya tidak maksimal dilakukan.

Kata Kunci: Peran, Penanggulangan, Banjir, Kota Pekanbaru

Abstract

Pekanbaru City has been the capital of Riau Province since 1958, Pekanbaru City is still often hit by floods and experiences quite extensive and long inundation in every rainy season. Floods can be in the form of water puddles, on land that is usually dry such as agricultural land, settlements, and city centers. Floods also cause significant damage to infrastructure and property. The purpose of this study is to see the role of the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) in Flood Management in Pekanbaru City and also to see the inhibiting factors of the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) in carrying out its role. The theory used in this study is the Role theory of Mudrajat Koncoro. The research method used in this study is by using a qualitative descriptive approach. The location of this study is in Pekanbaru City, Riau Province, with 3 data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results obtained from this study show that the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) has carried out its role in accordance with the indicators, coordinator, facilitator and stimulator, but the implementation has not been optimal because there are several obstacles and challenges so that the implementation is not optimal.

Keywords : Role, Countermeasures, Flood, Pekanbaru City

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan Sungai, wilayah dataran rendah, serta curah hujan tinggi akibat pengaruh iklim tropis. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau sejak tahun 1958, salah satu kota dengan Tingkat urbanisasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan Pembangunan Kawasan pemukiman serta pusat bisnis, terjadi pula perubahan drastis pada tata guna lahan yang berpengaruh pada sistem drainase dan daya dukung lingkungan. Sebagai pelaksana otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air, Pembangunan drainase, serta penyusunan tata ruang yang adaptif terhadap resiko banjir. Banjir dapat berupa genangan pada lahan yang biasanya kering seperti pada lahan pertanian, permukiman, dan pusat kota. Bila genangan air terjadi cukup tinggi, dalam waktu lama, dan sering maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan manusia. Banjir juga mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur dan properti. Hal ini dapat dilihat jika genangan banjir terlalu lama dan sering muncul di jalan maka bisa mengakibatkan kerusakan pada jalan. Banjir juga menimbulkan resiko yang cukup besar bagi Masyarakat, genangan air yang bertahan lama dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit seperti demam berdarah dan malaria.

Kota Pekanbaru sampai saat ini masih sering dilanda banjir serta mengalami genangan yang cukup luas dan lama di setiap musim hujan. Di dalam penanggulangan bencana daerah pemerintah harus mempunyai kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Instansi pemerintah yang berperan dalam melakukan penanggulangan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Banjir dan genangan merupakan sebuah keadaan alam yang hampir sama yaitu fenomena kelebihan jumlah air pada suatu daerah.

Genangan merupakan keadaan Dimana terjadinya penumpukan volume air disuatu tempat karena luapan dari tempat lain atau aliran yang pembuangannya kurang baik, sedangkan banjir merupakan peristiwa kenaikan muka air yang melebihi batas normal. Genangan memiliki kecepatan aliran yang sangat kecil, sehingga secara kasat mata, hampir terlihat seakan tidak mengalir, selain kecepatan aliran, genangan juga memiliki kecepatan menguap, dan meresap kedalam tanah, sedangkan banjir memiliki kecepatan aliran yang lebih besar dari genangan, yang secara kasat mata dapat kita lihat dengan jelas, sehingga memungkinkan banjir untuk mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dalam satuan waktu tertentu, dengan kata lain banjir memiliki debit aliran yang bisa dihitung. Dikatakan banjir apabila parameter menunjukkan angka yang tinggi, sedangkan untuk genangan memiliki parameter sendiri. Dari berbagai permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru sangat penting untuk melihat sejauh mana menjalankan tugas dan fungsinya baik sebagai koordinator, fasilitator dan stimulator.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara rinci sistematis dan mendalam tentang fenomena yang terjadi dilapangan tentang pelaksanaan peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru. Penelitian ini didasarkan pada pengamatan langsung

dilapangan dengan mengumpulkan data, mengobservasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman mengenai permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, memaparkan secara mendalam suatu fenomena, masalah menggambarkan fakta dan karakteristik objek penelitian apa adanya.

Key informan dan informan dalam penelitian ini ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Key informan dipilih dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, khususnya pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) yang berperan langsung sebagai tim pelaksanaan dilapangan dalam penanggulangan banjir di kota pekanbaru, para informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru.

Metode pengumpulan data yang digunakakn dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu cara memperoleh informasi lensung dari sumbernya. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data dan kontekstual dari informan yang terbatas jumlahnya namun memiliki posisi kunci, selain wawancara pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi terhadap proses dan aktivitas dilapangan, serta dokumentasi terhadap pelaksaian peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis proses pada tahap awal peneliti yaitu pengumpulan data selanjutnya reduksi data, membereikan gambaran yang lebih jelas dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan merupakan aspek dinamis dari status aspek fungsional dari kedudukannya, berarti seseorang menjalankan perannya dengan kata lain peranan seseorang tergantung pada kedudukannya. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam perencanaan dan Pembangunan infrastruktur yaitu bertanggung jawab untuk merencanakan dan membangun infrastruktur penanggulangan banjir seperti drainase dan Pembangunan tata ruang di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melihat kendala atau hambatan yang dihadapi tersebut sehingga bisa di lihat bahwa apakah sudah berperan secara optimal dan untuk melihat sejauh mana impementasi program yang telah direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini teori peran dari Blakely dalam Mudrajad Kuncoro digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana pelaksanaan peranan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPU) dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Teori ini dianggap relevan kerna indikator teori yang digunkan mampu menggambarkan secara keseluruhan sejauh mana peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah dilaksanakan secara efektif, dan efisien.

1. Koordinator

Koordinator dalam penelitian ini adalah seseorang atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola dan memastikan kelancaran suatu kegiatan, proyek atau tim. Perannya meliputi penyusunan strategi, komunikasi antar instansi dan anggotanya. Siagian (2005) menyatakan bahwa koordinator adalah pihak yang menjalankan fungsi manajemen untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan selaras, tidak bertabrakan, serta saling mendukung satu sama lain. Dalam penelitian ini koordiator digunakan untuk melihat, mengevaluasi sejauh mana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penaatan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengkoordinasikan berbagai pijhak atau

instansi terkait, serta melihat apakah Bidang Sumber Daya Air sudah efektif dan berhasil dalam bekerjasama dengan pihak lainya seperti, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan koordinasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan, dalam indikator koordinator pada Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru dinilai sudah cukup baik karena koordinasi terus dilakukan dnegan berbagai pihak lain yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sudah dilakukan secara efektif dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) memiliki tugas utama yaitu melakukan perencanaan, Pembangunan, normalisas sungai, serta memelihara saluran drainase di Kota Pekanbaru dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air (SDA) melakukan koordinasi yaitu Menyusun program pengendalian banjir dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru yang seharusnya dilaksanakan yaitu pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, ruang terbuka hijau (RTH), kolam retensi dan lainnya guna untuk mengurangi resiko datangnya genangan air atau banjir.

2. Fasilitator

Fasilitator dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Bidang Sumbe Daya Air memfasilitasi infrastruktur dalam Pembangunan drainase yang dilihat sebagaimana apakah sudah dilaksanakan perannya sebagi fasilitator. Menurut A.G. Lunandi Fasilitator harus memiliki beberapa fungsi utama, seperti empati, kewajaran, respek terhadap partisipan, komitmen dalam kehadiran, serta keterbukaan dalam berinteraksi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan dalam indikator koordinator yaitu dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Bidang Sumber Daya Air memberikan fasilitas Pembangunan system drainase sesuai dengan APBD dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru sebagai fasilitator dinas PUPR mampu memjabatani anatara kebutuhan Masyarakat dengan kebijakan pemerintah serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam Upaya penanggulangan banjir dan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru sudah mensurvei untuk Pembangunan drainase sesua dengan masterplain yaitu data titik banjir genangan di Kota Pekanbaru. Mendorong program pengendalian banjir pada Bidang Sumber Daya Air memacu untuk mempercepat perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pengendalian banjir, seperti normalisasi Sungai siak Sungai sail, pembangunan drainase sekunder dan tersier, serta kolam retensi.

3. Stimulator

Stimulator dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mmana dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mendorong, memotivasi dan memberikan insentif kepada sektor swasta, Masyarakat, atau lembaga lain agar berpartisipasi aktif dalam, perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan. Siagian (2005) Stimulator adalah pihak yang bertindak sebagai penggerak utama dalam proses pembangunan, yang berfungsi membangkitkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta mendorong sektor lain untuk bergerak secara sinergis dalam mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini, stimulator digunakan untuk melihat dan menilai apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru melalui Bidang Sumber Daya Air sudah menjadi aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengembangan Solusi-solusi yang inovatif untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan dalam indikator stimulator penulis menarik Kesimpulan pada peran dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru dinilai sudah berperan sebagai salah satu penggerak dan pendorong dalam Upaya penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru namun bukan sebagai aktor utama didalam stimulator. Dengan demikian peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai stimulator mempertegas bahwa banjir atau genangan air di Kota Pekanbaru tidak dapat ditangani secara sectoral atau tunggal, mealainkan harus melibatkan Kerjasama antar berbagai instansi dan partisipasi masyarakat.

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan mengenai bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Kewenangan anata Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Hambatan kewenangan ini menunjukkan pentingnya penyusunan mekanisme koordinasi antar pihak yang lebih kuat dan integratif antara pemerintah kota dan provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem drainase Kota Pekanbaru.
2. Keterbatasan Biaya Anggaran
Pengelolaan sistem drainase yang efektif memerlukan pembiayaan yang besar, sehingga tidak optimalnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru karena deficit anggaran, mencakup kegiatan perencanaan teknis, pembangunan infrastruktur, rehabilitasi saluran, pemeliharaan rutin, hingga pengadaan peralatan pendukung.
3. Kekurangan Alat operasional dan Kerusakan Alat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sering kali memiliki keterbatasan jumlah alat berat seperti ekskavator, backoloder, dump truck, pompa air portabel, dan alat penyedot sedimen. Hal ini menyebabkan pengerjaan proyek penanggulangan banjir menjadi tidak maksimal, bahkan tertunda, terutama ketika terjadi peningkatan intensitas curah hujan atau saat banjir datang secara tiba-tiba.
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan
Kurangnya kesadaran ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya bertumpu pada infrastruktur fisik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tetapi juga harus dibarengi dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif bersama masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menjaga dan tidak merusak sistem drainase menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan Kota Pekanbaru yang tahan terhadap banjir.
5. Pembangunan Tata Ruang Yang Tidak Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
Banyak pemilik ruko yang membangun tanpa mematuhi prosedur perizinan atau mengubah desain bangunan setelah surat rekomendasi izin keluar dari Bidang Sumber Daya Air. Hal ini menyulitkan pasukan kuning dari Bidang Sumber Daya Air untuk melakukan pembersihan dan perbaikan saluran ketika terjadi penyumbatan atau kerusakan.

SIMPULAN

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru ini dinilai cukup baik dan sudah terlaksana walaupun dalam menjalankan perannya belum begitu optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat ditarik Kesimpulan bahwa dalam pelaksan

menjalankan perannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik dan semestinya, tetapi dalam pelaksanaan kinerjanya belum bisa berjalan secara optimal. Karena terdapat berbagai hambatan didalamnya yaitu, keterbatasan biaya anggaran, kekurangan alat operasional, sering terjadi kerusakan alat, kesadaran masyarakat tentang kebersihan kota Pekanbaru, Pembangunan tata ruang yang tidak sesuai SOP.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berjalan secara optimal dan memberikan keberhasilan terhadap kinerjanya, peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan hambatan yang terjadi sebaiknya Pemerintah daerah Kota Pekanbaru perlu memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi dalam pengelolaan sistem drainase, guna mencegah tumpukan air serta memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan secara terkoordinasi dan efisien.

1. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru disarankan untuk terus mengusulkan peningkatan anggaran dalam RAPBD yang diarahkan secara khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase, serta mendorong penggunaan dana dari sumber alternatif seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau kerja sama dengan sektor swasta.
2. Pemerintah daerah bersama Satpol PP dan instansi terkait perlu lebih tegas dalam menindak bangunan seperti rumah yang menutup saluran air atau berdiri di atas sempadan saluran, serta memastikan mengikuti surat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama instansi terkait disarankan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga saluran drainase, tidak membuang sampah sembarangan, serta melibatkan warga dalam kegiatan bersih saluran secara rutin.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Meningkatkan keterbukaan informasi bagi pihak luar, termasuk peneliti, akademisi, maupun mahasiswa yang melakukan kajian ilmiah terkait peran dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Keterbukaan ini penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat hubungan antara institusi pemerintah dan dunia pendidikan. Mendorong kolaborasi dengan lembaga pendidikan, agar hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dapat menjadi masukan konstruktif bagi perencanaan dan evaluasi program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- A, R., Aditama, Mohammadilham, & Arif, R. H. (2024). Peran Koordinator Aviation Security (AVSEC) Dalam Meningkatkan Disiplin Anggota Di Bandara Abdul Rachman Saleh Malang. 1(3), 1–6.
- Wulandari, K., Pramono, J., & Suranto, J. (2014). Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengendalian Banjir di Kota Surakarta. 6(1).
- Sulistiyawati. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In Jurnal EQUILIBRIUM (1st ed., Vol. 5, Issue January). K- Media.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>